

MASALAH KEMISKINAN SUATU TANTANGAN BAGI PROFESI PEKERJA SOSIAL

Oleh

Andi Muhammad Arif Haris

Alumni Pascasarjana Spesialis 1 Pekerjaan Sosial STKS Bandung

Abstrak: Kemiskinan merupakan masalah sosial dan menjadi tantangan bagi profesi pekerja sosial. Dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian tindakan yang berurusan langsung dengan praktik di lapangan dalam situasi alami. Penelitiannya adalah pelaku praktik itu sendiri. Selain itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi dokumentasi yang bersumber dari sejumlah bahan bacaan seperti buku, jurnal, koran dan data sekunder lainnya tentang kemiskinan yang diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Selanjutnya berdasarkan dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa tantangan yang dihadapi para pekerja sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan di lapangan dapat menyempurnakan program-program penanggulangan kemiskinan yang tujuannya untuk membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Kata Kunci: Kemiskinan, Pekerja Sosial

THE PROBLEM OF THE POVERTY A CHALLENGE FOR THE SOCIAL WORKERS

By

Andi Muhammad Arif Haris

Alumni Postgraduate Specialist 1 STKS Social Work Bandung

Abstract: Poverty is a social problem and a challenge for the profession of social workers. In this research, in which the researcher used action research and qualitative research that related to the practice in the field in a natural situation. Besides that the research is the actor him self. A part from that data collection in this research is documentation or library research where the data sources from books, journals, news paper and other secondary data. furthermore the data was analysed in qualitative descriptive.

Based on the result of the research showed that the challenge for social workers in solving the problem of the poverty is focused on how to improve the programme of the solution of the poverty where the aim of the programme is to make social protection of the poor people.

Key : Poverty, Social Workers

A. Latar Belakang

Salah satu isu yang sering ramai diwacanakan yaitu terkait dengan masalah kemiskinan. Peralnya, fenomena sosial ini merupakan bagian dari patologi sosial yang implikasinya akan berdampak pada munculnya beragam bentuk perilaku anti sosial lainnya. Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal diantaranya rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, minimnya layanan kesehatan, gizi anak, dan buruknya mutu layanan pendidikan. Globalisasi ekonomi dan bertambahnya ketergantungan antara negara, tidak hanya merupakan tantangan dan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan suatu negara, tetapi juga mengandung resiko dan ketidakpastian masa depan perekonomian dunia

Untuk kasus Indonesia misalnya, yang mana pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap pemberdayaan keluarga miskin melalui amanah konstitusi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 34 (1) yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Yang mana ketentuan ini lebih dipertajam lagi dalam Undang-Undang No.13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin di mana negara memiliki kewajiban dan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan fakir miskin dan keluarganya.

Sementara itu menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa sampai Maret 2018 terdapat sebanyak 25,95 juta orang (9,82 persen) dan ini mengalami penurunan sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan periode September 2017 yang menyentuh angka 26,58 juta orang (10,12 persen). Wilayah perkotaan pada umumnya dipahami sebagai bentuk kehidupan masyarakat yang sangat individual, penuh kemewahan, gedung-gedung yang menjulang tinggi, kendaraan yang lalu-lalang,

perkantoran yang mewah serta pabrik-pabrik yang besar. Kota seringkali dianggap sebagai tempat tujuan masyarakat pedesaan untuk mencari pekerjaan; tempat yang menawarkan tidak hanya pendidikan formal baik akademik maupun vokasi, tetapi juga pendidikan nonformal dan life skill; dan juga sebagai pusat perkembangan industri. Di perkotaan juga ditemui beberapa kelompok pekerja di sektor informal, seperti penarik becak, tukang sapu jalan, pemulung, hingga pengemis. Pengentasan kemiskinan sejalan dengan pengembangan paradigma pembangunan sosial telah banyak dilakukan melalui pemberdayaan, hal tersebut merupakan upaya untuk melibatkan kelompok miskin dalam pembangunan sebagaimana pembangunan sosial yang memandang setiap warga negara harus berperan aktif dalam pembangunan. Selain itu, kemiskinan juga memberikan dampak yang beraneka ragam mulai dari aksi kejahatan, pengangguran serta berbagai bentuk kondisi kehidupan sosial ekonomi yang buruk lainnya. Memang diakui jika kemiskinan bisa menjadi pemicu lahirnya beragam masalah sosial meski untuk saat ini paling penting adalah bagaimana warga miskin dapat memperoleh akses pendidikan secara baik. Adapun Rumusan Masalah yaitu: a). Bagaimana tantangan pekerja sosial dalam menangani kemiskinan, b). Bagaimana perspektif pekerja sosial dalam menangani kemiskinan.

B. Tinjauan Pustaka

1. Defenisi Kemiskinan

Kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensional, sehingga perlu penanganan dengan melihat aspek lain dari kemiskinan. Menurut Tjokrowinoto dalam Sulistiyani (2017:27) menyatakan bahwa: “Kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan kesejahteraan (welfare) semata, tetapi kemiskinan menyangkut persoalan kerentanan (vulnerability), ketidakberdayaan (powerless), tertutupnya akses kepada pelbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan konsumsi, angka ketergantungan yang tinggi, rendahnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya”. Adapun Friedman dalam Suharto (2014:134) menegaskan bahwa: “Kemiskinan merupakan suatu kondisi sebagai akibat dari

ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial, kemiskinan dipandang sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial, meliputi modal produktif dan aset (misalnya tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber-sumber keuangan (pendapatan, kredit yang memadai), organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan dan tujuan bersama (partai politik, koperasi, kelompok usaha, kelompok simpan pinjam), network atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan keterampilan serta informasi yang berguna untuk memajukan hidup.

Penyebab utama kemiskinan di Indonesia adalah karena adanya kebijakan ekonomi dan politik yang kurang menguntungkan keluarga miskin, sehingga keluarga miskin tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak. Empat faktor lain, penyebab kemiskinan menurut Chambers dalam Khomsan, dkk (2015:3-4) yaitu:

- a) Kemiskinan absolut: bila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk papan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
- b) Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
- c) Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak lain.
- d) Kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

Guna menjalankan program kemiskinan dan tepat, basis data yang digunakan oleh pemerintah untuk perencanaan, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi, data yang digunakan adalah PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) 2011 yang berbasis rumah tangga. Data ini dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) selama enam bulan, sejak Juli sampai Desember 2011 hingga menghasilkan Basis Data Terpadu (BDT). Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.

Mengacu pada BDT, pemerintah mengeluarkan ketentuan yang mengatur tentang indikator kemiskinan yang standar dalam PERMENSOS No. 146 Tahun 2013 berikut ini:

- 1) Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
- 2) Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
- 3) Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang di subsidi pemerintah;
- 4) Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
- 5) Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- 6) Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/ tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
- 7) Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- 8) Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- 9) Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
- 10) Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang; dan

11) Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

Perkembangan zaman membuat pembangunan di suatu wilayah tidak bisa dihindari khususnya di perkotaan. Pembangunan fisik mengakibatkan termarginalisasikannya masyarakat miskin yang tidak memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sulistiyani (2017) bahwa perkotaan adalah suatu kawasan yang di dalamnya telah terjadi perubahan morfologis, dari kondisi sebelumnya, dengan dibangun fasilitas-fasilitas kota, disertai oleh terjadinya pergeseran fungsi produksi yang semula merupakan basis pertanian kemudian terjadi pergeseran menuju industri. keluarga miskin termasuk dalam PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) 2011. Dilihat dari multidimensi kemiskinan, kondisi Keluarga miskin sesuai dengan indikator yaitu pada aspek psikis (masalah mental keluarga miskin) kepercayaan akan potensi diri rendah, kurang disiplin dalam mengelolah waktu dan keuangan, konsumtif, dan mengandalkan bantuan pemerintah, aspek budaya yaitu keluarga miskin tidak biasa hidup hemat, tidak suka menabung, dan kurang berorientasi ke masa depan.

Disamping itu upaya lain yang perlu dilakukan untuk menekan pertumbuhan penduduk miskin yakni pentingnya melibatkan tenaga pekerja sosial. Pertimbangannya dalam perspektif profesi pekerjaan sosial yang mana keluarga miskin dipandang sebagai warga yang mengalami disfungsi sosial, karena ia tidak mampu melakukan tugas pokoknya dengan baik, yaitu tugas dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, seperti : pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan.

Apalagi ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya itu sangat berkaitan dengan faktor produksi. Artinya mereka tidak memiliki faktor produksi yang mencukupi, seperti : tanah, modal, dan keterampilan hidup (*life skills*). Tak hanya itu, tingkat pendidikan mereka pun juga rendah, karena umumnya hanya tamatan sekolah dasar, bahkan tidak sedikit pula yang tidak tamat sekolah dasar. Selain mempunyai keterbatasan dalam faktor kepemilikan tersebut, orang miskin juga lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas akses ekonominya, sehingga semakin tertinggal jauh dari kelompok

masyarakat lain yang mempunyai potensi . Perkotaan yang menyimpan daya tarik luar biasa, sehingga menimbulkan arus urbanisasi tak terkendali mengakibatkan gejala umum yang terjadi pada setiap pertumbuhan kota yaitu perubahan mekanisme ekonomi yang semula agraris menjadi basis industri. Hal tersebut memiliki konsekuensi perubahan mata pencaharian bagi penduduknya begitu pula kehidupan individu, sosial, ekonomi, budaya dan politik keluarga miskin berubah menjadi perilaku ekonom modern (industri).

2. Defenisi Pekerja Sosial

Selanjutnya pekerjaan sosial juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan situasi sosial yang kondusif bagi kehidupan mereka misalnya terciptanya peluang dan kesempatan usaha, terbukanya akses dan jaringan usaha/kerja, adanya jaminan usaha dan informasi pasar. Sedangkan pendekatan pekerjaan sosial dalam menangani masalah kemiskinan tidak hanya diarahkan kepada masyarakat miskin, tetapi juga ditujukan kepada situasi-situasi sosial yang mempengaruhi kehidupan mereka. Demikian pula intervensi pekerjaan sosial senantiasa melihat sasaran perubahan (orang miskin) tidak terpisah dari lingkungan dan situasi yang dihadapinya (*person-in-environment dan person-in-situation*). Keberfungsian sosial merupakan konsepsi yang penting bagi pekerjaan sosial karena merupakan pembeda antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi lainnya. Oleh karena itu, pendekatan pekerjaan sosial dalam menangani kemiskinan juga pada dasarnya harus diarahkan untuk meningkatkan keberfungsian sosial (*social functioning*) masyarakat miskin yang dibantu.

Dalam praktiknya, pekerja sosial memiliki beberapa tahapan dalam proses pertolongan. Banyak ahli menjelaskan tentang tahapan-tahapan proses pertolongan salah satunya adalah Max Siporin dalam Dwi Heru Sukoco (1993:138) yang menyebutkan tahapan-tahapan proses pertolongan pekerjaan sosial adalah sebagai berikut: *Engagement, Intake, and Contract, Assesment, Planning, Intervention, dan Evaluation and Termination*.

Pekerjaan sosial di dalam usaha mencapai tujuannya, yaitu memecahkan permasalahan sosial dan meningkatkan kemampuan orang dalam berinteraksi dengan orang lain maupun dengan sistem

sumber perlu melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: (Pincus dan Minahan, 1973:15)

a) Membantu orang meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah sosial yang mereka alami. Fungsi tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan tugas-tugas berikut ini:

- 1) Pekerja sosial mengidentifikasi dan mengadakan kontak dengan orang lain yang membutuhkan pertolongan dalam menghadapi pelaksanaan tugas-tugas kehidupan.
- 2) Pekerja sosial memberikan pemahaman, dorongan dan dukungan kepada orang-orang yang sedang dilanda krisis
- 3) Pekerja sosial dapat memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk mengatakan tentang kesulitan-kesulitan yang dialaminya.
- 4) Pekerja sosial dapat membantu orang untuk menguji beberapa alternative pemecahan masalah dan memberikan informasi untuk membantu mengambil keputusan.
- 5) Pekerja sosial dapat mengkonfortasikan orang dengan realitas situasi mereka, dengan cara memberikan informasi yang dapat mengganggu keseimbangannya dan kemudian memotivasi mereka agar mau melaksanakan perubahan.
- 6) Pekerja sosial dapat mengajarkan keterampilan-keterampilan untuk membantu individu merelisasikan aspirasi mereka dan melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

b) Mengkaitkan orang dengan sistem-sistem sumber

Fungsi tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan tugas-tugas berikut ini:

- 1) Pekerja sosial membantu mengidentifikasi orang yang membutuhkan sistem/tidak mampu memanfaatkannya, tetapi tidak menyadari bahwa mereka memenuhi persyaratan untuk menerima pelayanan sistem sumber itu.
- 2) Pekerja sosial memberikan informasi tentang adanya sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan, hak-hak mereka untuk memanfaatkannya dan menjelaskan prosedur-prosedur yang perlu dilakukan untuk memanfaatkan sumber tersebut.

- 3) Pekerja sosial dapat membantu orang untuk mengatasi masalah-masalah praktis dan memanfaatkan sistem-sistem sumber di atas.
 - 4) Pekerja sosial dapat membantu referal dan membantu orang untuk memperoleh sumber-sumber yang dibutuhkan.
 - 5) Pekerja sosial dapat bertindak sebagai advokasi dari sebagian orang yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam memanfaatkan sumber maupun negosiasi terhadap sistem.
 - 6) Pekerja sosial yang memberikan informasi dan bertindak sebagai advokat dapat memberikan informasi stimulasi kepada sistem-sistem kemasyarakatan yang ada untuk menguji kebijakan-kebijakan pelayanan yang diberikan kepada kelompok-kelompok orang yang membantu sistem tersebut agar lebih memungkinkan dalam memberikan pelayanan.
 - 7) Pekerja sosial dapat membantu orang untuk bertindak sebagai sumber bagi orang lain melalui pembentukan sistem-sistem baru, dimana mereka secara bersama-sama saling terkait.
- c) Memberikan fasilitas interaksi dengan sistem-sistem sumber
- Fungsi tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan tugas sebagai berikut :
- 1) Pekerja sosial dapat memberikan informasi kepada sistem-sistem sumber kemasyarakatan untuk mengilustrasikan permasalahan-permasalahan yang disebabkan karena pelaksanaan prosedur pemberian pelayanan kepada konsumen.
 - 2) Pekerja sosial dapat memberikan pelayanan sebagai konsultan bagi sistem-sistem kemasyarakatan dan dapat memberikan saran tentang metode-metode pemberian pelayanan yang berbeda-beda.
 - 3) Pekerja sosial dapat mengkonsultasi sistem-sistem informal untuk membantu mereka memperoleh memperoleh pelayanan-pelayanan yang ada maupun yang baru dari sistem sumber kemasyarakatan.
 - 4) Pekerja sosial dapat membawa orang ke dalam salah satu sistem sumber kemasyarakatan atau mengkaitkan orang dengan beberapa sistem sumber kemasyarakatan agar

- mereka dapat masuk pada perencanaan dan pendekatan yang terkoordinasi bagi keluarga maupun individu.
- 5) Pekerja sosial dapat bertindak sebagai advokat dari konsumen untuk menghadapi sistem-sistem sumber kemasyarakatan.
 - 6) Pekerja sosial dapat mengorganisasi para konsumen untuk menjadi anggota organisasi-organisasi yang baru atau membantu organisasi yang ada agar berbuat serupa.
 - 7) Pekerja sosial dapat menengahi dan memecahkan konflik-konflik diantara sistem-sistem sumber informal, anggota-anggota organisasi maupun sistem-sistem sumber kemasyarakatan.
- d) Memberikan fasilitas interaksi di dalam sistem-sistem sumber.
- Fungsi tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan tugas-tugas berikut ini:
- 1) Pekerja sosial menyalurkan informasi dari satu bagian sistem kepada bagian sistem yang lainnya.
 - 2) Disamping memberikan pelayanan netral, maka Pekerja sosial dapat juga memihak dan mengadvokasi (menjadi advokat) bagi kepentingan-kepentingan salah satu sistem yang kurang memiliki kekuatan, yaitu tidak mampu membuat keputusan maupun tidak mendapatkan kepuasan dari pelaksanaan peranannya dalam sistem tersebut.
 - 3) Pekerja sosial dapat membantu mengorganisasi sub-sub atau bagian-bagian dan bertindak sebagai advokat bagi mereka dan bekerja untuk mengubah bagian-bagian sistem tersebut.
 - 4) Pekerja sosial dapat bertindak sebagai konsultan bagi anggota-anggota sistem dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dialami dan menyarankan perubahan pada prosedur operasional maupun peranan yang harus dilaksanakan.
 - 5) Pekerja sosial dapat memberikan atau melatih keterampilan-keterampilan kepada anggota-anggota sistem agar mereka mampu melaksanakan peranan-peranan baru di dalam sistem itu.
 - 6) Pekerja sosial dapat mencoba untuk memasukkan anggota-anggota baru ke dalam sistem atau mendorong anggota-

anggota yang sudah ada untuk keluar agar sistem dapat meningkatkan fungsionalitasnya.

- 7) Pekerja sosial dapat melibatkan anggota-anggota sistem di dalam mendiagnosa permasalahan-permasalahan interaksi diantara mereka melalui pendiskusian kesulitan-kesulitan yang mereka alami atau menciptakan suatu mekanisme umpan-balik (feedback) dengan sistem itu sendiri.

Proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan bagi miskin, Schwartz dalam Suharto (2009), mengemukakan 5 (lima) tugas yang dapat dilaksanakan oleh pekerja sosial :

1. Mencari persamaan mendasar antara persepsi masyarakat mengenai kebutuhan mereka sendiri dan aspek-aspek tuntutan sosial yang dihadapi mereka.
2. Mendeteksi dan menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghambat banyak orang dan membuat frustrasi usaha-usaha orang untuk mengidentifikasi kepentingan mereka dan kepentingan orang-orang yang berpengaruh (significant others) terhadap mereka.
3. Memberi kontribusi data mengenai ide-ide, fakta, nilai, konsep yang tidak dimiliki oleh masyarakat, tetapi bermanfaat bagi mereka dalam menghadapi realitas sosial dan masalah yang dihadapi mereka.
4. Membagi visi kepada masyarakat; harapan dan aspirasi pekerja sosial merupakan investasi bagi interaksi antara orang dan masyarakat bagi kesejahteraan individu dan sosial.
5. Mendefinisikan syarat-syarat dan batasan-batasan situasi dengan mana sistem relasi antara pekerja sosial dan masyarakat dibentuk. Aturan-aturan tersebut membentuk konteks bagi 'kontrak kerja' yang mengikat masyarakat dan lembaga. Batasan-batasan tersebut juga mampu menciptakan kondisi yang dapat membuat masyarakat dan pekerja sosial menjalankan fungsi masing-masing.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Tujuan dari metode ini yaitu untuk mendapatkan data yang mendalam serta mengandung

makna. Bognan dan Taylor dalam Moleong (2011:4) mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif yang dapat diamati. Menurut Sugiyono (2014:1) bahwa: Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi pada objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Berdasarkan pendapat ahli di atas menunjukkan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang dilakukan pada kondisi alamiah. Peneliti melakukan pengamatan terhadap orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka secara menyeluruh sehingga dengan digunakannya metode kualitatif, maka data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan (*action research*). Istilah tindakan ini dikemukakan oleh Bums dalam Madya (2011:13); dimana mengandung pengertian yang mempertemukan antara pendekatan eksperimen dalam ilmu sosial dengan program tindakan sosial untuk memecahkan isu-isu pokok yang berkembang di masyarakat. Pendapat lain mengenai penelitian tindakan ini dikemukakan oleh Madya (2011:11) menyatakan bahwa:

Penelitian tindakan (*action research*) berurusan langsung dengan praktik di lapangan dalam situasi alami. Penelitiannya adalah pelaku praktik itu sendiri dan pengguna langsung hasil penelitiannya. Lingkup ajang penelitiannya sangat terbatas. Hal yang paling menonjol adalah penelitian tindakan ditujukan untuk melakukan perubahan pada semua diri pesertanya dan perubahan situasi tempat penelitian dilakukan guna mencapai perbaikan praktik secara inkremental dan berkelanjutan. Sedangkan sumber data dan cara menentukannya. Sumber data penelitian memilih subjek-subjek yang relevan dengan topik penelitian, dalam hal ini sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer dan data sekunder. Merujuk pada pendapat Lotfland dalam

Moleong (2011:157) bahwa sumber data utama di dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan data kemiskinan. Pada penelitian teknik yang digunakan dalam menentukan informan adalah *Judgement sampling (Purposive Sampling)*. Teknik *Judgement sampling* adalah teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik atau pertimbangan tertentu yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Moleong, 2011:130).

D. Pembahasan

Perspektif profesi pekerjaan sosial, orang miskin adalah orang yang mengalami disfungsi sosial. Karena ia tidak mampu melakukan tugas pokoknya dengan baik, yaitu tugas dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, seperti : pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Ketidakkampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya itu sangat berkaitan dengan faktor produksi. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 34 (1) yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Yang mana ketentuan ini lebih dipertajam lagi dalam Undang-Undang No.13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin di mana negara memiliki kewajiban dan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan fakir miskin dan keluarganya. Program pemerintah untuk mengangani masalah kemiskinan di Indonesia seperti Perlindungan Sosial melalui Program Keluarga Harapan penyediaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), memperbaiki kebijakan penyaluran raskin, layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), layanan beasiswa kurang mampu melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), program pemberdayaan masyarakat. Program tersebut tidak lain untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Selain itu, beberapa strategi nyata melalui pembangunan masyarakat desa, pemberian beasiswa, perbaikan kebijakan penyaluran dana bantuan sosial, pemberdayaan jaminan sosial nasional, mempertahankan daya beli penduduk miskin, dana amanah, pembangunan rumah bagi fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat bagi keluarga miskin.

Dari serangkaian strategi penanggulangan kemiskinan, ada beberapa strategi pemerintah yang berorientasi pada material sehingga diperlukan kajian. Strategi yang orientasinya material belum tentu menjamin keberlanjutan program atau strategi tersebut karena sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Pekerja sosial dalam menangani masalah kemiskinan dapat menggunakan metode pekerjaan sosial yakni *community development/community organization* dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi upaya penanggulangan kemiskinan. *Community development* adalah metode yang dapat dilakukan untuk membangun masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat sendiri. Masyarakat terlibat secara aktif dalam mengelola dan mengorganisasikan segala potensi yang mereka miliki, sehingga pada tahap tertentu berbagai aktivitas tersebut membutuhkan pelembagaan dalam institusi yang lebih formal. Bekerja bersama masyarakat (*working with people*) dan menolong masyarakat untuk menolong dirinya sendiri (*to help people to help themselves*) adalah prinsip utama dalam penerapan metode ini. Strategi-strategi yang digunakan dalam metode *community development*, sebagai upaya peningkatan dan pengembangan kapasitas masyarakat miskin tersebut adalah bagaimana strategi pemecahan masalah sebagaimana yang dimaksudkan untuk mengajak warga masyarakat miskin melihat dan menyadari permasalahan yang dihadapi, kemudian mendiskusikan bersama bagaimana cara mengatasi masalah tersebut untuk ikut terlibat didalamnya.

E. Kesimpulan

Indonesia sebagai negara yang jumlah penduduk miskinnya masih besar membutuhkan peran profesi pekerja sosial untuk membantu mereka agar bisa keluar dari kondisi kemiskinannya. Tantangan pekerja sosial yang diharapkan dapat memperbaiki kesalahan cara pandang kemiskinan serta memperbaiki dengan tujuan untuk menyempurnakan program-program penanggulangan kemiskinan yang selama ini untuk membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang banyak mengalami kegagalan.

F. Implikasi

1. Memberikan kontribusi kepada pembuat kebijakan, pekerja sosial, pemerintah dalam melihat kemiskinan di Indonesia secara komprehensif dan holistik tidak hanya dari perspektif ekonomi dan fisik tetapi dari sudut pandang multi dimensi yang meliputi ekonomi, politik, sosial, psikologis dan budaya.
2. Pemerintah harus mengubah kebijakan, dengan melihat masalah kemiskinan dari multi dimensi sehingga menghasilkan kebijakan inklusif dan membutuhkan multi pihak dan multi disiplin ilmu dalam penanganan kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Khomsan, Ali dkk. 2015. *Indikator kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2011. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Pincus, Allen dan Anne Minahan. 1973. *Social Work Practice : Model and Methode*. Itasca, Illinois : Peacock Publishers
- Sugiyono. 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2017. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Edisi kedua. Yogyakarta: Gava Media.
- Suharto, Edi, (2009), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama
- _____. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian strategi pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sukoco, Dwi Heru. 2011. *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Sumber Lain

- Undang-Undang No.13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.